

**EFEKTIVITAS PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN  
UMUM MENGENAI PENUTUPAN JALAN JATIBARU RAYA TANAH ABANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**RIZKI RISNANDAR**

**145010101111081**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG KETERTIBAN UMUM MENGENAI PENUTUPAN JALAN  
JATIBARU RAYA TANAH ABANG**

Oleh:  
**RIZKI RISNANDAR**  
NIM: 145010101111081

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama

Dr. Shinta Hadiyantina, SH., M.H  
NIP.197703052009122001

Pembimbing Pendamping

Arif Zainudin, SH., M.Hum  
NIP. 197201232003121001

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara,

Lutfi Effendi, SH., M.Hum  
NIP. 196008101986011002

**LEMBAR PENGESAHAN****SKRIPSI****EFEKTIVITAS PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG KETERTIBAN UMUM MENGENAI PENUTUPAN JALAN  
JATIBARU RAYA TANAH ABANG**

**RIZKI RISNANDAR**  
NIM : 145010101111081

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal .....  
dan disahkan pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.  
NIP. 197703052009122001

Arif Zainudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197201232003121001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.  
NIP. 196208051988021001

Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 196008101986011002

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

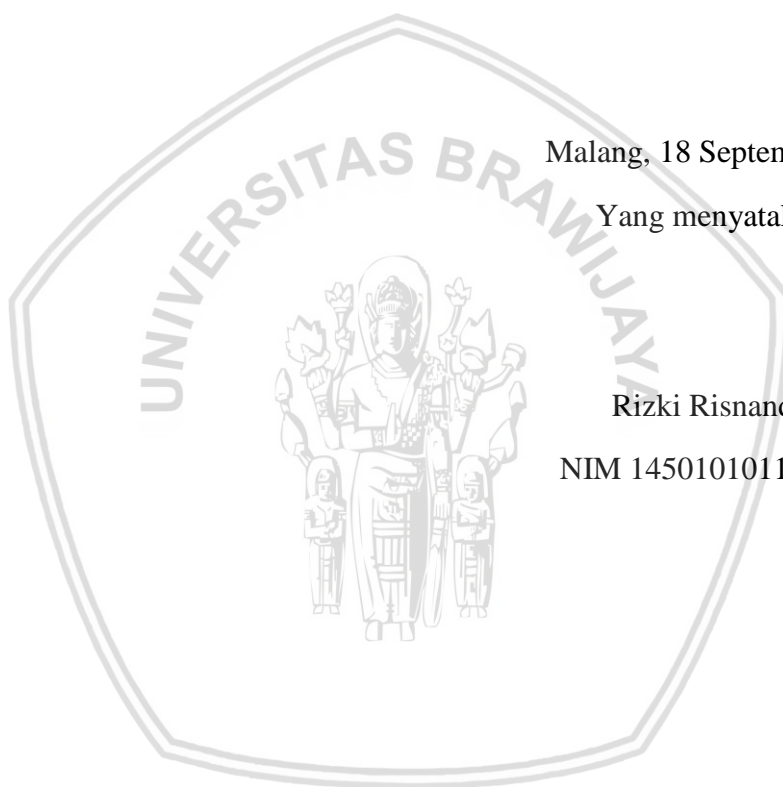
Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 18 September 2018

Yang menyatakan,

Rizki Risnandar

NIM 145010101111081



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Arif Zainudin, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Papa, Mama, dan Adik-adik selaku keluarga terdekat yang selalu memberi doa dan dukungan.
6. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta selaku pihak yang telah memberikan informasi yang selengkap-lengkapannya untuk keberlangsungan skripsi ini.
7. Suchy Sugiarto selaku pacar saya yang telah mendukung dan membantu keberlangsungan skripsi ini.
8. Putri, syafira, dzikri, eben, tamara, mia, ghina, satria, kiky, deby, sarah, dan leon selaku teman yang telah mendukung dan membantu keberlangsungan skripsi ini.
9. Teman-teman kosan, teman-teman babut, teman-teman KKN dan teman-teman lain yang telah mendukung skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 11 September 2018

Rizki Risnandar

NIM 145010101111081

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>ix</b>

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	14
1. Definisi Penegakan Hukum.....	14
2. Teori Penegakan Hukum .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas .....	16
1. Definisi Efektivitas.....	16
2. Teori Efektivitas .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik .....	23
1. Definisi Kebijakan.....	24
2. Definisi Publik.....	24
3. Definisi Kebijakan Publik .....	24
4. Ciri-Ciri Kebijakan Publik .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan.....	25
1. Definisi Ketertiban .....	25
2. Definisi Umum Dan Lingkungan .....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Jalan .....	26
1. Definisi Jalan.....	26
2. Fungsi Jalan.....	26
F. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	27
1. Definisi Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	27
2. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	27

### III. METODE PENELITIAN



A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis Dan Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Populasi, Sampel, Dan Teknik Sampling.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Definisi Operasional.....	33
I. Sistematika Penulisan .....	34
<b>IV. Hasil Dan Pembahasan</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .....	37
1.1 Geografis .....	37
1.2 Visi Dan Misi .....	38
2. Keadaan Pasar Tanah Abang .....	39
3. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.....	40
3.1 Lokasi Instansi.....	40
3.2 Visi Dan Misi .....	40
3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	43
4. Satpol PP DKI Jakarta.....	44
4.1 Lokasi Instansi.....	45
4.2 Sejarah Instansi.....	45
4.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	49
4.4 Visi Dan Misi .....	51
B. Efektivitas Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang .....	52
C. Upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Efektivitas Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang .....	62
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 4.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	52
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Kegiatan (Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Bulan Juli 2017 .....	54
Tabel 4.3 Data Jumlah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta tahun 2018 .....	60





## RINGKASAN

Rizki Risnandar, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2018, Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., M.H dan Arif Zainudin, SH., M.Hum.

Permasalahan Tanah Abang mengenai pedagang kaki lima merupakan masalah klasik bagi pemerintahan provinsi khusus DKI Jakarta, sudah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi khusus Ibukota Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini. Yang terbaru ialah dikeluarkannya kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang yang dipergunakan untuk para pedagang kaki lima ini untuk berjualan. Kebijakan ini menimbulkan banyak pro-kontra baik dimasyarakat maupun para penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan upaya pemerintah terkait Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji reaksi dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap adanya Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, data sampling dari dinas yang terkait, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang, dan wawancara terhadap masyarakat. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang belum efektif, dikarenakan masih banyak permasalahan yang timbul akibat kebijakan tersebut, mulai dari ketidaksesuaian dengan undang-undang maupun dari masyarakatnya yang berdampak langsung pada kebijakan ini. Pada penelitian ini juga, upaya penyelesaian dalam kasus ini ialah segera membangun *skybridge*, memindahkan para pedagang kaki lima Jatibaru, serta membangun kembali blok G Tanah Abang.

## SUMMARY

Rizki Risnandar, State Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2018, Article 25 paragraph (1) of the Rules of the Special Capital City of the Capital City of Jakarta Number 8 of 2007 concerning the Public Order Regarding the Closure of Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., M.H and Arif Zainudin, SH., M.Hum.

The Tanah Abang problem regarding street vendors is a classic problem for the provincial government specifically for DKI Jakarta, there have been many ways that have been done by the provincial government of the capital city of Jakarta to solve this problem. The most recent is the issuance of the closing policy of Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang which is used for these street vendors to sell. This policy causes many pros and cons both in the community and law enforcement.

Based on the above background, the legal issues that can be raised in this study are how the effectiveness and efforts of the government in relation to activities Article 25 paragraph (1) of the Special Capital Region of the Capital City of Jakarta Number 8 of 2007 concerning Public Order Regarding the Closure of Jatibaru Highway Raya Land Brother.

To answer the above problems, this empirical juridical study examines the reactions and phenomena that occur in the community against the existence of Article 25 paragraph (1) of the Daihan Special Province of the Capital City of Jakarta Number 8 of 2007 concerning the General Order. Legal materials relating to the problem under study were obtained through the study of literature, sampling data from related agencies, interviews with experts / authorities, and interviews with the community. The legal materials that have been obtained are analyzed using qualitative descriptive, so that they can be presented in more systematic writing to answer the legal issues that have been formulated.

Based on the discussion, it can be concluded that Article 25 paragraph (1) of the Rules of the Special Capital City of the Capital City of Jakarta Number 8 of 2007 concerning the Public Order Regarding the Closure of Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang has not been effective, because there are still many problems arising from the policy, ranging from incompatibility with the law and from the community which has a direct impact on this policy. In this study too, the settlement effort in this case was to immediately build the skybridge, move the Jatibaru street vendors, and rebuild the G Tanah Abang block.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara besar yang mempunyai jumlah penduduk yang besar juga, dengan jumlah penduduk yang sekitar 262 juta jiwa<sup>1</sup>. Tentulah menjadikan Indonesia sebagai negara yang padat. Selain dikenal dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia juga dikenal dengan kaya budayanya karena terdapat banyak provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta yang mana juga merupakan ibukota dari negara Indonesia itu sendiri. DKI Jakarta sendiri sebagai ibukota Indonesia dikenal sebagai kota metropolitan dan bisnis negara Indonesia. Sebagai Ibu Kota negara DKI Jakarta masih banyak menyimpan masalah yang belum dapat diatasi hingga saat ini seperti macet, banjir, pendidikan, dan yang lainnya. Khusus untuk macet sudah banyak upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak dulu untuk mengatasi masalah klasik dari DKI ini seperti pembangunan MRT, adanya busway, diberlakukannya peraturan ganjil-genap, dan banyak lainnya, namun seperti belum ditemukan cara efektif mengatasi masalah ini khususnya yang terjadi pada jalan di Ibu Kota Indonesia ini.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,

---

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>, diakses pada 12 Januari 2018.

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel<sup>2</sup>. Maka dari itu negara wajib menjaga fungsi jalan sebagaimana mestinya seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 34 ayat (3) yaitu Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak<sup>3</sup>. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel<sup>4</sup>. Peran jalan atau fungsinya seperti dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 ialah;

- a. Sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.
- b. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi masyarakat, bangsa, dan negara.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>3</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- c. Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang negara pun sudah mengaturnya, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta di daerah sendiri pun sudah diatur sedemikian rupa misal Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Permasalahan jalan itu kompleksitas di setiap wilayah Indonesia seperti adanya macet, digunakan oleh PKL atau tidak sebagaimana mestinya, kurangnya diperhatikan sarana bagi pejalan kaki, salah satunya tak terkecuali di Ibu Kota Indonesia itu sendiri yaitu DKI Jakarta. Memang keberadaan pedagang kaki lima merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi pedagang kaki lima. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:<sup>5</sup>

1. Kesulitan ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi

Contoh kasus terbaru pada wilayah DKI Jakarta ialah dengan keluarnya peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri dengan menutup jalan

---

<sup>5</sup>Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science Tahun 2016, hlm. 6.

Jatibaru Raya yang sedang heboh dikalangan masyarakat Jakarta itu sendiri yang berada dikawasan Tanah Abang. Memang dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Povinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang dimana dikatakan Gurbenur menunjuk bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima<sup>6</sup>, tapi sebagaimana bahwa peraturan daerah itu tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang yang lebih tinggi seperti bagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti pada pasal 131 ayat (1) bahwa ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki. Tentunya permasalahan jalan yang berada di Tanah Abang bukanlah maslaah baru yang dihadapi oleh baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri maupun masyarakat Jakarta.

Pasar Tanah Abang merupakan salah satu pusat perbelanjaan grosir terbesar di Jakarta. Pasar tersebut juga telah mengalami beberapa perubahan sejak dibangun pertama kali hingga saat ini Pasar Tanah Abang yang dulu dikenal dengan Pasar Sabtu berdiri sejak tahun 1735. Yustinus Vinck adalah sosok yang dikenal sebagai pendiri pasar perdagangan ini atas izin dari Gubernur Jenderal Abraham Patramini. Pasar Tanah Abang terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Tanah Abang Metro, Tanah Abang Lama dan Tanah Abang AURI. Tanah Abang Lama terdiri dari beberapa blok, antara lain blok A, B dan F. Sementara Tanah Abang AURI memiliki blok

---

<sup>6</sup>Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 8 Tahun 2007.



yang lebih banyak, yaitu A, B, C, D, E, F, G, AA, BB dan CC. Warga memanfaatkan hari libur untuk berbelanja berbagai kebutuhan satu minggu menjelang Idul Fitri. Di pasar tersebut, disediakan beragam macam barang. Mulai dari busana seperti pakaian muslim, baju batik, kerudung, mukena, busana hajian, pakaian anak-anak. Lalu juga perlengkapan rumah tangga, dari spring bed, gorden, seprai, handuk, hingga keset. Kemudian, di sana bisa menemukan banyak aksesoris, seperti kalung, gesper, gelang, bros. Tak ketinggalan ada pula tas cantik dan koper yang bisa ditemukan. Pasar Tanah Abang terus menjadi perhatian warga. Sebab tak hanya penuh dengan pengunjung yang berbelanja, lokasi di luar gedung pun dipenuhi oleh pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang kaki lima sendiri menurut Karafir ialah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah<sup>7</sup>. Belum lagi kemacetan yang nampaknya selalu saja hadir setiap harinya. Ditambah dengan tingkat kriminalitas yang menjadi ketakutan orang-orang jika berada di sana. Untuk PKL, tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mencoba merelokasi para PKL. Terutama yang berada di kawasan dekat dengan Stasiun Tanah Abang untuk pindah ke gedung Blok G pasar. Namun karena sepi pengunjung, para pedagang kembali mengokupasi jalur pedestrian. Hal tersebut pun menjadi persoalan di

---

<sup>7</sup> Karafir Pieter Yan, 1977, **Pemupukan Modal Pedagang Kakilima: Penelitian Studi Kasus di Daerah Tanah Abang Pasar Jakarta**, Jakarta: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial. Hlm.4.

lapangan<sup>8</sup>. Namun hal tersebut pada zaman era Gubernur Ahok sempat teratasi dengan tidak adanya lagi para PKL yang berjualan di jalur pedestrian karena semua PKL berhasil direlokasi ke penampungan Blok G, namun setelah terjadinya pergantian gubernur dan wakilnya sekarang PKL kembali memadati jalur pedestrian. Jalur pedestrian (*pedestrian ways*) merupakan ruang pelayanan yang berfungsi untuk kegiatan pejalan kaki dalam melakukan aktivitas, sehingga dapat meningkatkan keamanan, kelancaran dan kenyamanan bagi pejalan kaki.

Kondisi Pasar tanah abang saat ini sedang dalam kontroversi menyusul Instruksi Gubernur DKI Jakarta untuk menutup Jalan Jati Baru, dimana kebijakan ini memperbolehkan penggunaan Jalan Jatibaru dipakai untuk PKL berjualan. Dalam peraturan ini Pemprov DKI Jakarta hanya memperbolehkan angkot Tanah Abang melintasi Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat mulai pukul 18.00-08.00. Para supir angkot yang jurusan tanah abang merasa dirugikan dengan kebijakan ini, mereka pun sudah melakukan demo seperti tanggal 22 Januari 2018 kemarin<sup>9</sup>. Akhirnya setelah melakukan demo selain transjakarta Tanah Abang Explorer angkot pun boleh melintasi jalan tersebut. Sejak sopir angkot memprotes penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan

---

<sup>8</sup> Angggita Muslimah, **Sejarah Tanah**

**abang**, <https://travel.kompas.com/read/2017/11/09/182000327/sejarah-tanah-abang-dari-kebun-pal-em-hingga-pusat-grosir>, diakses 11 September 2017.

<sup>9</sup> Jessi Carina, **Unjuk Rasa Sopir Angkot dan Dugaan ada Unsur Politis**, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/31/09203911/unjuk-rasa-sopir-angkot-tanah-abang-dan-dugaan-ada-unsur-politis>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018.



baru . Saat ini, jalan tersebut hanya boleh dilintasi bus TransJakarta Tanah Abang Explorer dan angkot. Sementara kendaraan motor tetap dilarang melintas pada jam tertentu yaitu mulai pukul 08.00 sampai 18.00 WIB<sup>10</sup>. Instruksi Gubernur ini tentunya mendapat reaksi yang pro-kontra, mungkin dari kalangan PKL kebijakan ini cukup menguntungkan karena penjualan mereka di daerah Jatibaru lebih mendapatkan pemasukan yang lebih besar, namun bagi para pemilik ruko khususnya di blok G mereka cukup dirugikan dengan menurunnya omset penjualan mereka, mereka menuntut agar Jalan Jatibaru dibuka kembali. Dan dengan adanya kebijakan terganggunya fungsi jalan sebenarnya yang dimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Secara pengamatan kebijakan ini juga menabrak beberapa peraturan seperti pasal 28 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dalam ayat (1) disebut setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan<sup>11</sup>, Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, yaitu Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimana dalam ayat (1) Gubernur

---

<sup>10</sup>Hari Ariyanti,

<https://www.merdeka.com/jakarta/tak-ada-aturan-soal-jl-jatibaru-tak-boleh-untuk-motor-sandi-bila-ng-tanya-dishub.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2018.

<sup>11</sup> Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

memang dapat menunjuk dapat menunjuk wilayah yang bisa didiami oleh PKL, namun jelas ini sudah bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Dikalangan masyarakat dan pengguna jalan pun banyak keberatan dengan adanya kebijakan ini karena terganggunya fungsi jalan sebenarnya karena dengan adanya kebijakan ini membuat terjadinya kemacetan dan akses yang cukup susah karena Jalan Jatibaru ditutup, untuk kebersihan pun karena adanya PKL yang berjualan di Jalan ini membuat daerah tersebut kembali terlihat berantakan.

Dengan berdasarkan melihaturaian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian empiris terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjudul **“Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang”**. Diharapkan penelitian ini agar dapat menunjukkan bahwa peraturan tersebut efektif sesuai dengan peraturan atau tidak di Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ini merupakan tabel mengenai tabel penelitian terdahulu sebagai bentuk perbandingan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya sebelum membahas rumusan masalah dan agar dapat diketahui letak perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2010	Nurfaiqoh, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Analisis Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Mengemis, Mengamen, Dan Berjualan Di Asongan Di Keamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat	1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Mengemis, Mengamen, Dan Berjualan Di Asongan Di Keamatan Cengkareng? 2. Hambatan Apa Sajakah Yang Dihadapi Pemerintah Setempat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum	Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan terkait hanya kepada pengemis, pengamen, dan penjualan asongan dan penjualan asongan bukan kepada pedagang kaki lima. Dan lokasinya di Cengkareng, sementara pada penelitian ini saya mengambil lokasi Tanah Abang.
2.	2016	Daniel Fernando, Untung Dwi Hananto,	Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor	1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah DKI	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada faktor-faktor

		Dan Fifiana Wisnanej, Fakultas Hukum/ Universitas Diponegoro	8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum	Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum? 2. Apakah Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum? 3. Upaya Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi?	umum yang berada pada peraturan daerah ini, sedangkan pada pannelitian saya lebih memfokuskan pada pasal 25 ayat(1) dimana dalam permasalahannya gurbanur dapat menunjukkan tempat untuk para PKL namun menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya di Tanah Abang
3.	2016	Mega Angelia Kondorura , Drs. Achmad Taufiq, M.Si, Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si	Implementasi Peraturan Daerah Dki Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Pkl Di Monumen Nasional)	A. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Monumen Nasional? B. Apa saja Kendala-K	Pada penelitian terlebih dahulu lebih luas membahas Peraturan Daerah Dki Jaarta sedangkan pada penelitian saya lebih diutamakan pada pasal 25 ayat 1, dan perbedaan lokasi tempat

				endala Yang Dihadapi Dalam Pengimplemen tasianPeratura n Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum?	penelitiannya.
--	--	--	--	---	----------------

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya yang

dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

a. Dari Segi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran bagi wawasan keilmuan di Indonesia pada bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya pengetahuan ilmu hukum administrasi negara.

b. Dari Segi Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam menumbuhkan ketajaman untuk menganalisa dan kemampuan berpikir dalam menyikapi permasalahan yang timbul di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

## 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran, serta mempertimbangkan sebagai bahan rujukan pemerintah yang lebih khususnya kepada pemerintah daerah provinsi ibukota Jakarta terkait Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi aspek hukum atas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan hukum

##### 1. Definisi Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum adalah tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memkasakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>12</sup>

##### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hokum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, **Masalah Penegkan Hukum**. Sinar Baru: Bandung.1983, hlm. 24.



konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup>

Hart membedakan lima arti dari positivisme seperti yang banyak disebut dalam hukum kontemporer sebagaimana dikutip oleh W. Friedmann, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah - perintah manusia.
- b. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
- c. Anggapan bahwa analisa (atau studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum:
  - i. Layak dilanjutkan
  - ii. Harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab - sebab atau asal usul dari undang-undang dan dari penelitian - penelitian sosiologis mengenai hubungan dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan - tuntutan sosial, fungsi-fungsinya, atau sebaliknya

---

<sup>13</sup> Dellyana, Shant, 1988, **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty: Yogyakarta, hlm. 37.

<sup>14</sup> W. Friedmann, **Teori-teori Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum** (Susunan I), penerjemah Muhammad Arifin, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 130.

- d. Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup di mana putusan - putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara - cara yang logis dari peraturan - peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan - tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma - norma moral.
- e. Anggapan bahwa penilaian - penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pernyataan - pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas**

### **1. Definisi Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil<sup>15</sup>. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Sondang efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya<sup>16</sup>. Menurut Atmosoeprapto menyatakan efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efesiensi adalah melakukan hal secara

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>16</sup> Sondang Siagian, 2008. **Pengertian Tentang Efektifitas**, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 4

benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efesiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat<sup>17</sup>.

## 2. Teori Efektivitas

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya<sup>18</sup>. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain<sup>19</sup>:

---

<sup>17</sup> Atmosoeprapto, 2002. **Menuju SDM Berdaya**, Jakarta:PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO, hlm. 139

<sup>18</sup> Achmad Ali. 2009. **Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)**. Jakarta. Penerbit Kencana, hlm. 375.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 376

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

- d. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- e. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- f. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- g. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- h. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :<sup>20</sup>

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 376.

Jika yang dikaji adalah efektivitas perundang undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung faktor, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation*(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut<sup>22</sup>. Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 378.

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 379.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. 2007. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.** Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

## 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>24</sup>

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 8.



dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>25</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>26</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 37.



Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>27</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan

---

<sup>27</sup> Iffa Rohmah. 2016. **Penegakkan Hukum**. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2015.

oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>28</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik

#### 1. Definisi Kebijakan

Menurut Kuncoro Kebijakan adalah kata yang mencakup tentang pemerintah, pemerintahan, kebijaksanaan politik atau kecerdikan, bijaksana, atau perilaku bijaksana atau manajemen dan atau sebuah prinsip, rencana, atau penyebab terjadinya tindakan oleh individu atau organisasi pemerintah.<sup>29</sup>

#### 2. Definisi Publik

Istilah publik pada prinsipnya menunjukkan varian yang menjadi milik masyarakat, bersifat umum atau milik negara dari kesatuan sistem politik.<sup>30</sup>

#### 3. Definisi Kebijakan Publik

Nugroho secara sederhana mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah. Wahyudi berpendapat kebijakan publik adalah produk hukum yang berupa aturan-aturan yang mengenai pernyataan, himbauan atau ajakan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 53.

<sup>29</sup> Dody Setiawan, **Pengantar Kebijakan Publik**, Intelegensia Media, Malang, 2017, hlm. 10

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 17

pemerintah untuk warganya.<sup>31</sup>

#### **4. Ciri-ciri Kebijakan Publik**

- a. Merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu.
- b. Merupakan aktivitas yang memiliki pola saling berkaitan satu dengan lainnya memiliki tujuan yang jelas, dilakukn oleh pemerintah.
- c. Dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, bukan hanya apa yang diinginkannya.
- d. Dapat berbentuk positif, dapat pula negatif.<sup>32</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan**

##### **1. Definisi ketertiban**

Menurut kamus bahasa indonesia ketertiban adalah keadaan serba teratur baik<sup>33</sup>. Sedangkan secara umum ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan ketentuan yang ada, ini berkaitan dengan keamanan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

##### **2. Definisi umum dan lingkungan**

Menurut kamus bahasa indonesia umum adalah mengenai seluruhnya atau semuanya.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 18

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 24.

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>34</sup>

Menurut Soedjono lingkungan hidup adalah Menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

## **E. Tinjauan umum tentang Jalan**

### **1. Definisi Jalan**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

### **2. Fungsi jalan**

Peran jalan atau fungsinya seperti dijelaskan pada Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 ialah;

- a. Sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

- b. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)**

### **1. Definisi Pedagang Kaki Lima(PKL)**

Orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha produksi, penjualan barang-barang dan jasa jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, yang dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal<sup>35</sup>. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak

---

<sup>35</sup>Agustinawati, **Apa dan Mengapa Pedagang Kaki Lima**. Pustaka Setia. Semarang, 2000, hlm. 17.

tetap.<sup>36</sup>

## 2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)

Ciri-ciri dari PKL ialah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
- b. Tidak memiliki surat izin usaha.
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- d. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

---

<sup>36</sup>Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

<sup>37</sup> Aris Ananta, **Mengurai Akar Masalah Pedagang Kaki Lima**. Yayasan Obor. Jakarta, 2002, hlm. 17.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mencari data - data lapangan yang berfokus dengan isu hukum yang sedang diteliti dan memerlukan data primer dan data sekunder. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>38</sup> Menggunakan metode ini karena karena penelitian ini meneliti perilaku hukum dalam meneliti pelaksanaan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.<sup>39</sup> Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas permasalahan Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang

---

<sup>38</sup> Muliadi Nur, **Tipologi Penelitian Hukum**, [www.pojokhukum.com](http://www.pojokhukum.com), diakses pada 17 Desember 2017 pukul 12.44 WIB.

<sup>39</sup> Roni Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 106

Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

### **C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam melakukan penelitian ini adalah kawasan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemilihan lokasi ini karena munculnya peraturan penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang yang memunculkan polemik di masyarakat.

### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dalam suatu penelitian yang dilakukan berupa pengamatan dan observasi secara langsung serta wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait seperti para Pedagang Kaki Lima di Tanah abang, pengguna jalan didaerah Tanah Abang, beberapa pemilik kios Blok G di tanah abang serta dinas perhubungan DKI Jakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data-data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan diperoleh secara tidak langsung, dengan melakukan studi kepustakaan berupa literatur, penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen yang diperoleh dalam penelitian, jurnal-jurnal, artikel, serta surat kabar terkait dengan penelitian yang dilakukan ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**



## 1. Data Primer

Teknik dalam pengumpulan data primer untuk penelitian ini menggunakan teknik seperti dengan cara wawancara yakni dengan melakukan wawancara tersebut secara langsung antara peneliti dan juga responden secara tatap muka. Mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Jadi wawancara merupakan alat mencari data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya.

## 2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa literatur, peraturan perundang – undangan, jurnal-jurnal, artikel dan lain-lainnya yang perlu dan terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti.

## F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

### 1. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri – ciri atau karakteristik tertentu.<sup>40</sup> Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengguna jalan di daerah Tanah Abang, pemilik kios Blok G di tanah abang, Pedagang Kaki Lima Jatibaru, Supir mikrolet kawasan Tanah Abang, serta kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

---

<sup>40</sup> Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI – Press, Jakarta, 2007, hlm. 172

## 2. Sampel

Penelitian ini dalam memperoleh data yang representatif, maka penelitian ini dalam penentuan data melalui teknik penarikan sampel. Sampel adalah kelompok kecil yang merupakan bagian dari populasi yang diamati sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.<sup>41</sup> Pada penelitian ini, sampel yang diteliti adalah beberapa pengguna jalan di daerah Tanah Abang, beberapa pemilik kios Blok G di Tanah Abang, beberapa Pedagang Kaki Lima Jatibaru, beberapa Supir mikrolet kawasan Tanah Abang, Bapak Santoso Kasi PPNS dan Penindakan Satpol PP Jakarta Pusat dan Ibu Aini Utari Petugas Dishub DKI Jakarta bagian Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi.

## 3. Teknik Sampling

Teknik Sampling adalah teknik dalam pengambilan suatu sampel dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* yaitu teknik sampling yang dipilih secara acak, cara dapat diambil karena analisa penelitian cenderung bersifat deskriptif atau bersifat umum.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan

---

<sup>41</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 121

terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian serta perilaku subjek penelitian yang dilakukan dengan wawancara di lapangan oleh Penulis.<sup>42</sup> Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Lalu menganalisis Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Memaparkan semua data yang diperoleh dalam penelitian baik berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifikasi yang lebih substantive dari suatu konsep yang tujuannya dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya.<sup>43</sup>

- a. **Efektivitas** dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum adalah pengukuran keberhasilan sebuah peraturan dalam pencapaian sebuah tujuan-tujuan dan fungsi fungsi hukum itu sebagaimana semestinya.

---

<sup>42</sup> Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 153

<sup>43</sup> Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 118

- b. **Efektivitas Hukum** adalah dimana harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.
- c. **Kebijakan Publik** adalah produk hukum yang berupa aturan-aturan yang mengenai pernyataan, himbauan atau ajakan pemerintah untuk warganya.
- d. **Ketertiban Umum** adalah suatu standar yang dibuat oleh pembentuk peraturan/ undang-undang atau pengadilan sebagai suatu dasar yang penting bagi negara dan semua masyarakat didalamnya.
- e. **Jalan** adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- f. **Pedagang Kaki Lima** adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan atau dibongkar pasang.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pemilihan tema penelitian, rumusan masalah yang merupakan bahasan pokok dari penelitian, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori dan konsep yang berkenaan dengan Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian yang digunakan peneliti, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik perolehan atau pengumpulan data, populasi dan sampel, sampai teknik menganalisis data hasil penelitian.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dan analisis berkenaan dengan judul penelitian yaitu Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian secara singkat tentang penelitian ini dan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah ada pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran oleh peneliti yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

###### 1.1 Geografis

Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia dengan luas wilayah 661,26 km<sup>2</sup>. Terletak antara 60, 12' lintang selatan dan 1060, 48' bujur timur serta 7 meter diatas permukaan laut. ). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa<sup>44</sup>.

Batas wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan : Sawangan dan Kota Depok.
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kota Tangerang.
- Sebelah utara berbatasan dengan : Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan: Kota Bekasi.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima kota yaitu; Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan satu Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu.

---

<sup>44</sup> Sensus Penduduk 2010. Biro Pusat Statistik.



## 1.2 Visi dan Misi

Visi:

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.<sup>45</sup>

Misi:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> <http://ppid.jakarta.go.id>

<sup>46</sup> *Ibid.*

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

## 2. Keadaan Pasar Tanah Abang

Tanah Abang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Jakarta. Tanah Abang sendiri sudah berada sejak 1735, dan terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sejak akhir Mei hingga awal Juni 2018 ini, kondisi Pasar Tanah Abang, di Jakarta Pusat, kian memprihatinkan Ratusan pedagang kaki lima (PKL) mengokupasi hampir seluruh trotoar pasar disana.

Saat dipantau Kompas.com, Rabu (6/6/2018) siang, sepanjang trotoar Jalan Jatibaru Raya hingga di depan pintu masuk Stasiun Tanah Abang, telah dipenuhi PKL.<sup>47</sup> Para PKL menjajakan berbagai jenis dagangan mulai kacamata, pakaian dalam, celana, serta sejumlah produk fashion lainnya. Tepat di samping tangga stasiun, pedagang bakso, siomay, dan makanan lainnya berjajar menaikan gerobak mereka di trotoar.

Padahal, trotoar yang berada sejajar dengan stasiun semestinya bersih dari PKL. Pemprov DKI Jakarta hanya menggunakan sisi jalan sebaliknya

---

<sup>47</sup> David Oliver Purba, Kondisi Tanah Abang kian semerawut karena PKL, <https://megapolitan.kompas.com> diakses pada tanggal 06 Juni 2018, Pukul 21.01 WIB

sebagai lokasi untuk para pedagang. Petugas di Stasiun Tanah Abang tak bisa melakukan apa-apa lantaran pengawasan dan penindakan berada di bawah Satpol PP DKI Jakarta.

Pemandangan kesemrawutan PKL saat ini, nyaris tak berubah seperti saat dipantau akhir Mei kemarin. Saat itu, Camat Tanah Abang Dedi Arif darsono yang dihubungi Kompas.com menyatakan akan menindaklanjuti masalah itu. Namun, hingga hari ini tidak ada perubahan berarti soal kondisi PKL di sana.<sup>48</sup>

### **3. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta**

#### **3.1 Lokasi Instansi**

Lokasi Jl. Taman Jatibaru No.1 RT.17/RW.1, Cideng Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150.

#### **3.2 Visi dan Misi**

##### **Visi**

Visi Dinas Perhubungan Kota Jakarta ialah mewujudkan Jakarta baru melalui penyediaan layanan transportasi yang handal, modern, dan berdaya saing Internasional, dengan angkutan publik sebagai layanan utama.

##### **Misi**

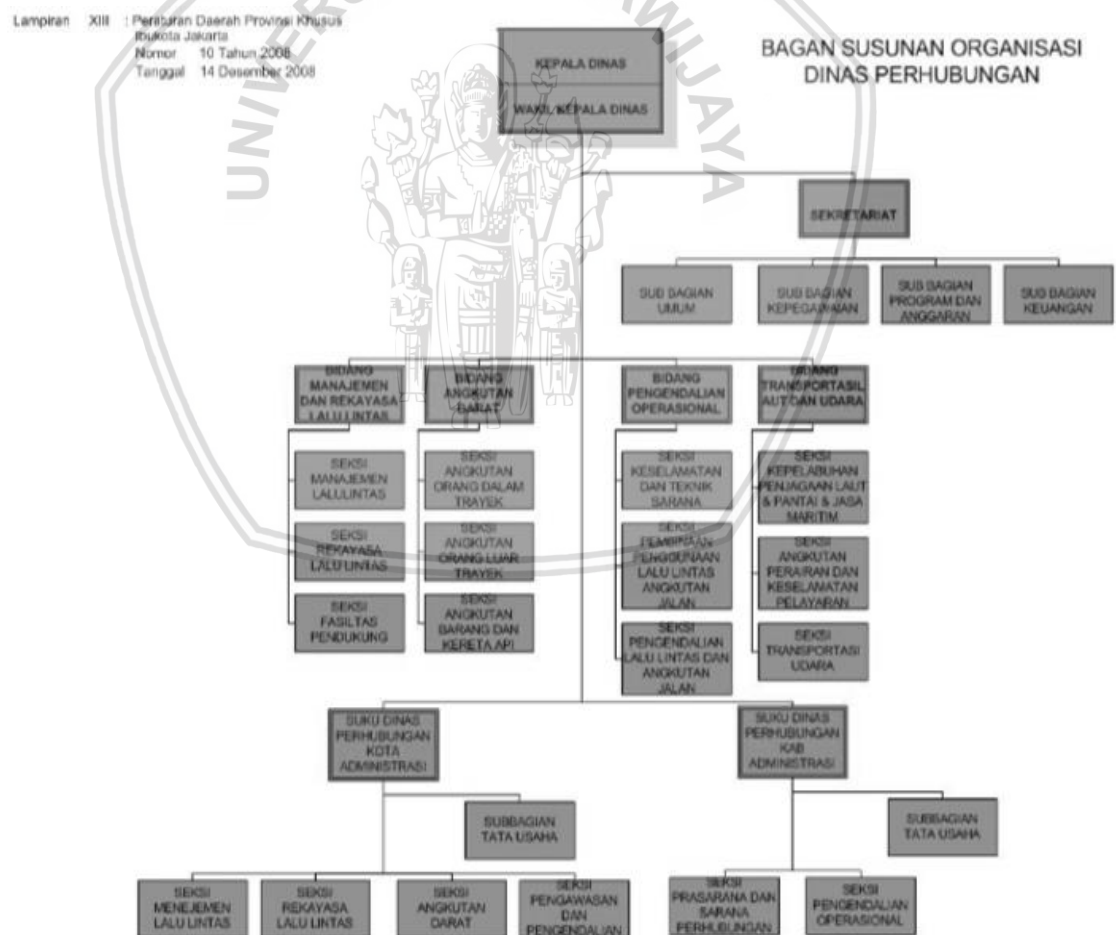
Misi Dinas Perhubungan yaitu :

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

- a. Mewujudkan transportasi darat yang aman, tertib, terintegrasi dan terjangkau.
- b. Mewujudkan transportasi udara yang berstandar internasional serta pengembangan wilayah.
- c. Mewujudkan transportasi laut yang berstandar internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serta pengembangan wilayah.

### Struktur Organisasi



Susunan organisasi Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Kepegawaian;
  3. Subbagian Program dan Anggaran;
  4. Subbagian Keuangan.
- d. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, terdiri dari:
  1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  3. Seksi Fasilitas Pendukung.
- e. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari:
  1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
  2. Seksi Angkutan Orang Luar Trayek;
  3. Seksi Angkutan Barang dan Kereta Api.
- f. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari:
  1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
  2. Seksi Pembinaan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g. Bidang Transportasi Laut dan Udara, terdiri dari:

1. Seksi Kepelabuhanan, Penjagaan Laut dan Pantai, dan Jasa Maritim;
2. Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran;
3. Seksi Transportasi Udara.

### 3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

#### Tugas Pokok

Menyelenggarakan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perhubungan darat, laut dan udara.

#### Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, laut dan udara.
2. Pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan program, evaluasi dan pengembangan sistem perhubungan darat, laut dan udara.
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, laut dan udara.
4. Pemberian izin atau rekomendasi di bidang perhubungan darat, laut dan udara.
5. Pemberian dukungan teknis dan administratif di bidang perhubungan darat, laut dan udara.

6. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas operasional di bidang perhubungan darat, laut dan udara.
7. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan darat, laut dan udara.
8. Penetapan lokasi parkir di badan jalan dan di luar badan jalan.
9. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengaturan dan penetapan pedoman pengelolaan SAR Provinsi di bidang perhubungan darat, laut dan udara.
10. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor.
11. Penentuan tarif ekonomi untuk angkutan jalan, angkutan penyeberangan, laut dan udara.
12. Penyusunan, penetapan dan perencanaan jaringan angkutan jalan;
13. Pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang perhubungan darat, laut dan udara.
14. Pemungutan retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat, laut dan udara.
15. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Suku Dinas.

#### **4. Satpol PP DKI Jakarta**



#### 4.1 Lokasi Instansi

Jalan Tanah Abang I No.1, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8,  
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160.

#### 4.2 Sejarah Instansi

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi

militer/Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi<sup>49</sup>.

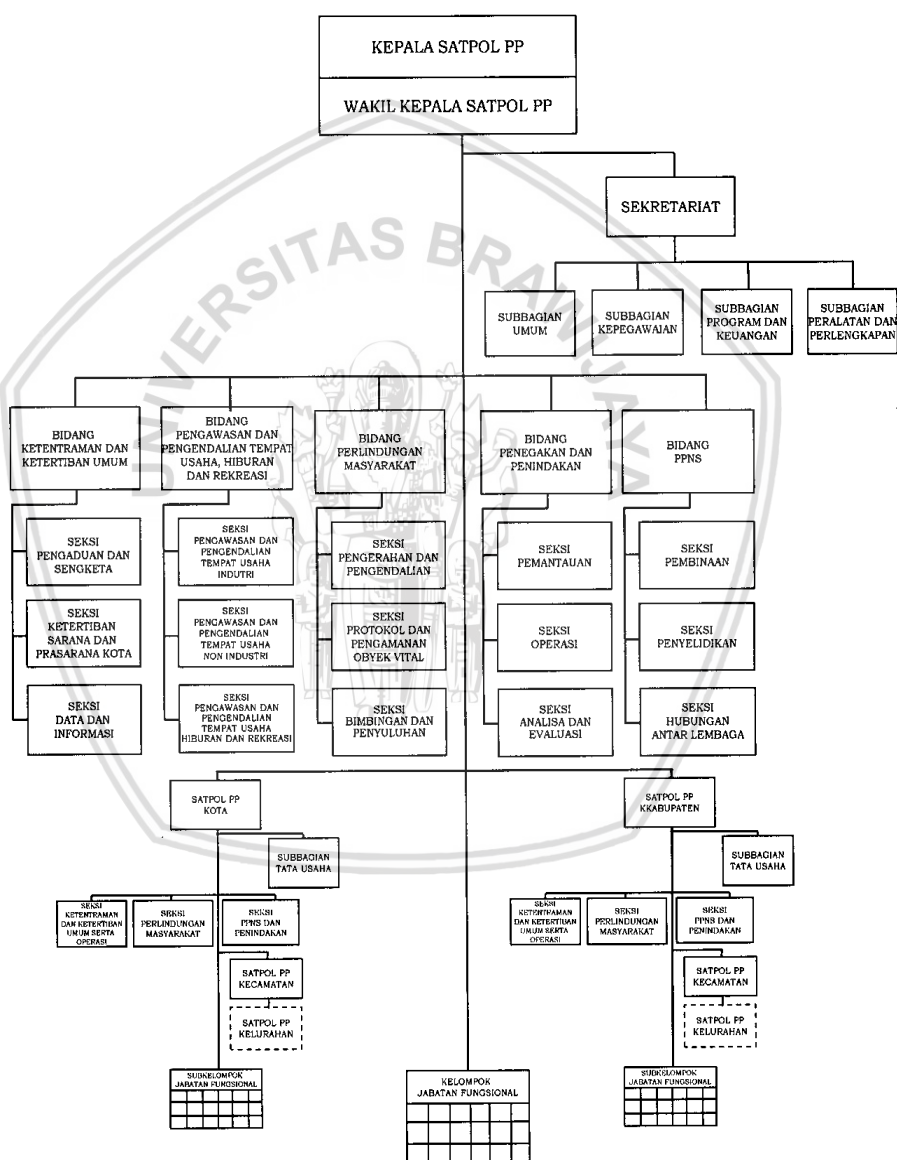
---

<sup>49</sup> <https://satpolpp.jakarta.go.id/>

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 285 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttt

SUMARSONO

Susunan organisasi Satpol PP, sebagai berikut:

- a. Kasatpol PP
- b. Wakasatpol PP
- c. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Kepegawaian;
  3. Subbagian Program dan keuangan
  4. Subbagian peralatan dan perlengkapan
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
  1. Seksi Pengaduan dan Sengketa
  2. Seksi Ketertiban Sarana dan Prasarana Kota
  3. Seksi Data dan Informasi
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, terdiri atas :
  1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
  1. Seksi Pengerahan dan Pengendalian
  2. Seksi Protokol dan Pengamanan Objek Vital
  3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

g. Bidang Penegakan dan Penindakan, terdiri dari:

1. Seksi Pemantauan
2. Seksi Operasi
3. Seksi Analisan dan Evaluasi

h. Bidang PPNS, terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan
  2. Seksi Penyidikan
  3. Seksi Hubungan Antar Lembaga
- i. Satpol PP Kota
  - j. Satpol PP Kabupaten
  - k. Satpol PP Kecamatan
  - l. Satpol PP Kelurahan
  - m. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

##### **1. Tugas**

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## 2. Fungsi

Satpol PP mempunyai fungsi:<sup>50</sup>

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai wewenang:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>51</sup>*Ibid.* Pasal 7.

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

#### 4.4 Visi dan Misi

##### 1. Visi

Mewujudkan Jakarta Baru Yang Tertib dan Tentram Dengan Berorientasi Pada Pelayanan Publik.

##### 2. Misi

- a. Menjaga Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.



- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Prasarana dan Sarana, serta Kemampuan Aparatur dalam Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

**B. Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang**

Penertiban Pedagang Kaki Lima memang merupakan masalah klasik bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Banyak pendatang ke Ibukota merupakan salah satu penyebab banyaknya pedagang kaki lima di ibukota. Banyaknya para pedagang kaki lima ini kerap kali menyebabkan masalah ketertiban umum di ibukota, sehingga membuat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membuat kebijakan demi menertibkan atau menyelesaikan masalah berkaitan pedagang kaki lima ini, salah satunya mengenai penataan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

No	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	81.686	150.276	170.102

Sumber: Data Primer. Tidak diolah

Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Kepolisian menutup Jalan Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk mencoba mengatasi kemacetan di wilayah Tanah Abang yang diketahui sangat padat oleh kendaraan. Meskipun penutupan jalan itu mengundang banyak reaksi di masyarakat, pemerintah tetap melakukannya dan telah membuat rekayasa lalu lintas. Melalui Intruksi Gubernur nomor 17 tahun 2018 yang merupakan satu-satunya payung hukum untuk kebijakan tersebut. Dalam Instruksi Gurbenur tersebut tertulis gurbenur menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Pusat agar mengoordinasikan semua kegiatan penataan Kawasan Tanah Abang yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Memang dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Povinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang dimana dikatakan Gurbenur menunjuk bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. Tapi sebagaimana bahwa peraturan daerah itu tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang yang lebih tinggi seperti bagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti pada pasal 131 ayat (1) bahwa ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 28 ayat (2) dalam Undang-Undang yang sama bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada

fungsi perlengkapan jalan. Berdasarkan pasal 34 ayat (4) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang dimana dikatakan bahwa trotoar itu sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki<sup>52</sup>. Hal ini menjelaskan bahwa fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Jalan Jatibaru sendiri diisi oleh 372 unit tenda untuk menampung 400 pedagang kaki lima yang menempati sepanjang Jalan Jatibaru<sup>53</sup>.

**Tabel 4.2**

**Rekapitulasi Hasil Kegiatan (Penegekan Perda 8 Tahun 2007) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Bulan Juli 2017**

Kegiatan	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	Jumlah
Gepeng	29	0	2	5	2	0	38
Waria	0	0	0	4	0	0	4
Pengamen	0	4	0	6	0	0	10
Pak Ogah	5	1	5	4	8	0	23
Pedagang Asongan	0	0	0	2	0	0	2
Anak	5	0	2	15	6	0	28

<sup>52</sup>Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Santoso Tanggal 1 Agustus 2018, pukul 14.34 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat.

Jalanan							
Pengedar Kotak amal	0	0	0	0	0	0	0
Orang Gila	0	0	3	2	1	0	6
Baliho	1	0	14	9	13	0	37
Reklame	4	10	146	30	41	0	231
Umbul Umbul	95	25	98	212	52	0	482
Banner	27	6	185	193	370	0	781
Spanduk Komersil	568	115	479	1166	813	0	3141
Spanduk Partai	8	0	0	59	69	0	136
Bendera Partai	324	0	105	75	611	0	1115
Keping	30	146	270	45	219	0	710
Pamflet	58	86	46	392	111	0	693
Tawuran	1	0	0	0	3	0	4
Unjuk Rasa	50	3	1	19	14	0	87
Pohon Tumbang	5	2	1	1	0	0	9
Kebakaran	20	32	36	39	39	5	171
Banjir	0	0	0	0	0	0	0
Pedagang Kaki Lima	594	21	19	97	555	6	1292

Gerobak	99	73	72	40	90	0	374
Gubuk Liar	36	34	6	5	9	0	90
Bangunan Liar	97	65	35	351	301	0	849
Spanduk Provokatif	0	0	7	1	4	0	12

Sumber: Data Sekunder. Website resmi Satpol PP Jakarta. Tahun 2017

Dalam Tabel diatas adalah contoh data penegakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bulan juli 2017. Dalam data tersebut penegakan Peraturan Daerah ini dimana terlihat bahwa penegakan Pedagang Kaki Lima salah satu yang terbanyak dibawah penegakan terhadap spanduk komersil. Dan salah satu tempat terbanyak ditegakkannya perda ini terjadi di Daerah Jakarta Pusat yaitu sebanyak 594 kejadian. Tanah abang merupakan salah satu tempat di Jakarta Pusat yang selalu mempunyai masalah pada penegakkan pedagang kaki lima.

Menyangkut tema dalam penulisan ini yaitu Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI terkait Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah abang, dalam kasus ini ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target

yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dimana dalam kasus ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengeluarkan peraturan ini untuk menjalankan hukum sebagaimana semestinya.

Dalam membuat keputusan pun sebagai harus melihat apakah keputusan tersebut sudah sesuai tujuan dan fungsi dari hukum tersebut. Fungsi Hukum sendiri adalah sebagai perlindungan, fungsi keadilan, dan dalam pembangunan. Fungsi hukum secara umum sendiri adalah:

- a. Untuk melindungi kepentingan manusia.
- b. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
- c. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
- d. Sebagai alat perubahan sosial(penggerak pembangunan).
- e. Sebagai alat kritik (fungsi kritis).
- f. Untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi dimasyarakat.

Dalam jabaran fungsi hukum secara umum tersebut dimana dijelaskan bahwa hukum itu harus berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Tapi dalam kebijakan ini dalam kenyataan malah menyebabkan ketidak tertiban dan keteraturan yang terjadi seperti banyak dijlaskan bahwa trotoar dan jalan raya itu harus berfungsi sebagaimana semestinya dan dalam kebijakan ini malah membiarkan para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan. Dalam satu wawancara dalam media cetak Dominikus Dalu yaitu seorang senior

asisten Ombudsman RI mengatakan bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta karena bahwa penggunaan fungsi jalan itu untuk orang dan kendaraan, bukan untuk pedagang dan fungsi lainnya<sup>54</sup>.

Dalam penjabaran fungsi hukum diatas bahwa hukum itu berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial, dalam kasus ini kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan fungsi keadilan, karena dalam beberapa wawancara yang sudah saya ambil dari beberapa penjual/pemilik kios di Blok G Tanah Abang dan supir mikrolet jurusan tanah abang yang biasanya melalui jalan Jatibaru tersebut merasa bahwa kebijakan ini jauh dari kata adil. Salah satu mikrolet yang berhasil kita wawancari mengaku pendapatannya setelah ada kebijakan penutupan Jalan Jatibaru ini turun 50 persen dari biasanya mereka dapatkan, hal ini disebabkan oleh rute yang biasa mereka lewati harus diubah dan lebih sepi konsumen, serta adanya Transjakarta Tanah Abang Explorer yang satu-satunya kendaraan yang bisa melewati Jatibaru serta untuk mengelilingi Tanah Abang menjadi penyebabnya<sup>55</sup>. Memang kebijakan ini hanya berlaku dari jam 08.00-18.00 namun tetap saja 10 jam pentupan jalan tersebut sangat berpengaruh bagi penghasilan mereka. Mereka berharap bahwa kebijakan ini bisa dibatalkan sehingga mereka dapat melewati

---

<sup>54</sup>Wawanca Dominikus Dalu, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, dilakukan oleh Media Harian Merdeka, diupload Senin 26 Maret 2018, Pukul 08.04 WIB

<sup>55</sup>Wawancara dengan narasumber Bapak Samsul Rizal supir mikrolet 06 Tanah Abang, Tanggal 26 Juli 2018, pukul 13.00 WIB



rute yang biasa mereka lewati. Para supir angkot ini pun telah melakukan penolakan nyata berupa demo yang pernah mereka lakukan pada tanggal 22 Januari 2018 lalu.

Fenomena ini juga tak jauh beda dialami oleh pedagang/pemilik kios yang berjualan di Blok G, keadaan yang dialami mereka cenderung lebih parah daripada yang dialami supir mikrolet, banyak toko-toko yang sudah tutup atau disegel oleh pihak pasar karena tidak mampu membayar cicilan toko tersebut. Sepinya pasar Blok G tanah abang ini pun dikarenakan letak mereka yang berhadapan langsung oleh Jalan Jatibaru yang dimana jalan tersebut diisi oleh banyak pedagang kaki lima, sehingga banyak membuat pengunjung lebih banyak membeli barang dari Pedagang Kaki Lima tersebut dikarenakan posisi yang lebih dekat dari stasiun dan halte busway yang tersedia. Dari sumber yang berhasil saya wawancara yaitu salah satu penjual dalam toko blok G tersebut mengaku omset beliau turun jauh, yang biasanya sehari mereka setidaknya dapat menjual 2 atau 3 baju sekarang sampai 2 minggu ini saja barang dagangannya pun tidak ada satupun yang terjual<sup>56</sup>. Para pemilik kios di blok G ini pun berharap bahwa suara mereka didengar oleh pemerintah, karena bagaimanapun mereka harus menghidupi sanak keluarga mereka.

Tak ketinggalan pengunjung Tanah Abang pun yang melewati Jalan Jatibaru merasa bahwa kebijakan penutupan Jalan Jatibaru ini yang dipergunakan oleh

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan narasumber Bapak Amin Pedagang di Blok G, tanggal 26 Juli 2018, pukul 14.00 WIB

pedagang kaki lima berjualan di trotoar dan dijalan ini cukup membuat kesemerawutan yang membuat pengunjung merasa kurang nyaman<sup>57</sup>. Dalam uraian tersebut terlihat bahwa kebijakan ini belum memenuhi fungsi hukum sebagaimana semestinya dan belum adanya penegakan hukum secara benar karena penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, namun ternyata masih banyak rakyat yang terbebani oleh peraturan ini.

**Tabel 4.3**  
**Data Jumlah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta**

Nomor	Kota	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
1	Provinsi	424	193
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	509	286
3	Kota Adm. Jakarta Utara	356	235
4	Kota Adm. Jakarta Barat	517	275
5	Kota Adm. Jakarta Selatan	625	290
6	Kota Adm. Jakarta Timur	749.	313
7	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	100	16

<sup>57</sup>Wawancara dengan narasumber, Anis Taufik, pengunjung Pasar Tanah Abang, tanggal 26 Juli 2018, pukul 13.30 WIB

Sumber: Data Sekunder. Website resmi Satpol PP DKI Jakarta. Tahun 2018

Dalam kasus ini kebijakan penutupan Jalan Jatibaru selain petugas Satuan Polisi Pamong Praja tak lepas juga dari kerja Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan terlihat selain adanya petugas Satpol PP juga terlihat adanya petugas dinas perhubungan yang terlihat di lokasi. Lokasi kantor Dinas Perhubungan juga memang tak jauh dari lokasi penutupan jalan tersebut. Dari wawancara yang saya dapatkan dalam kantor Dinas perhubungan pun sebenarnya awalnya mereka ingin menutup Jalan Jatibaru tersebut awalnya sebenarnya hanya ingin menutup Jalan Jatibaru tersebut hanya untuk melarang pejalan kaki untuk melewati Jalan tersebut bukan untuk melarang kendaraan yang lewat apalagi untuk dipakai berjualan oleh para Pedagang Kaki Lima<sup>58</sup>. Karena menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahwa yang membuat tanah abang semerawut ialah para pejalan kaki yang sangat banyak khususnya di daerah Jatibaru karena berdekatan dengan stasiun, dan ini cukup masuk akal karena menurut wawancara saya dengan Pak Santoso bahwa dalam setiap harinya ada sekitar 300.000 orang yang turun dari stasiun Tanah Abang<sup>59</sup>.

Dalam peraturan ini pun ada kegagalan terkait payung hukum, kita sama-sama tahu bahwa kasus ini sempat ramai dimana Ombudsman sangat

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Aini Utari Tanggal 6 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso Tanggal 1 Agustus 2018, pukul 14.34 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat

menentang kebijakan ini, dan dasar hukum dari kebijakan ini sendiri yaitu Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penataan Kawasan Tanah Abang, bahwa kekuatan Ingub saja tidak cukup, karena Ingub merupakan instruksi yang berlaku untuk internal pemerintah dan tidak mengikat masyarakat umum, sedangkan yang mengikat masyarakat umum harus dikeluarkannya Peraturan Gubernur. Dan Instruksi Gubernur nomor 17 tahun 2018 ini pun baru diresmikan pada tanggal 6 Februari 2018, padahal kebijakan ini sudah diberlakukan mulai 22 Desember 2017, berarti selama 1 bulan lebih kebijakan ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum.

**C. Upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang**

Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan kebijakan diatas mempunyai masalah, yaitu seperti kebijakan tersebut banyak bertabrakan dengan undang-undang yang lebih tinggi, menumpuknya banyak pedagang kaki lima di Jakarta termasuk di Tanah Abang namun tidak mempunyai lahan untuk berjualan, serta belum maksimalnya pemanfaatan gedung blok G Tanah Abang yang keadaannya sekarang malah memprihatinkan, dan masyarakat pun masih banyak yang merasa dirugikan dari kebijakan ini. Oleh karena itu maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta harus sesegara mungkin menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang.

Dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi pada jalan Jatibaru Tanah Abang di Jakarta maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah dan akan melaksanakan:

1. Segera membangun *Skybridge*

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di tanah Abang sudah ada perencanaan untuk membangun *Skybridge* yang akan dibangun sepanjang 400 meter dengan pembagian 4 zona a, zona b, zona c dan zona d. Jarak antara zona sekitar 100 meter. Pembangunan *Skybridge* akan dimulai dari zona a yaitu dari simpang Jalan Jatibaru di depan Blok G. Hal ini pun dibenarkan oleh pak santoso, dimana nantinya para pedagang kaki lima yang menempati Jalan Jatibaru akan direlokasi untuk diberi lahan dan bisa jualan dalam *Skybridge*<sup>60</sup>.

2. Memindahkan para Pedagang Kaki Lima Jatibaru

Dari pengamatan yang dilakukan para pedagang kaki lima sebenarnya bisa dipindahkan ke lahan kosong milik PD Sarana Jaya yang juga berada disekitar Tanah Abang sehingga tidak lagi harus berjualan di sekitar trotoar atau pun di Jalan Jatibaru. Hal ini pun rencanya juga akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso Tanggal 1 Agustus 2018, pukul 14.34 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat

Khusus Ibukota Jakarta bila relokasi para pedagang kaki lima Jatibaru tidak mencukupi untuk dipindahkan semua pada *Skybridge*.

### 3. Membangun kembali Blok G Tanah Abang

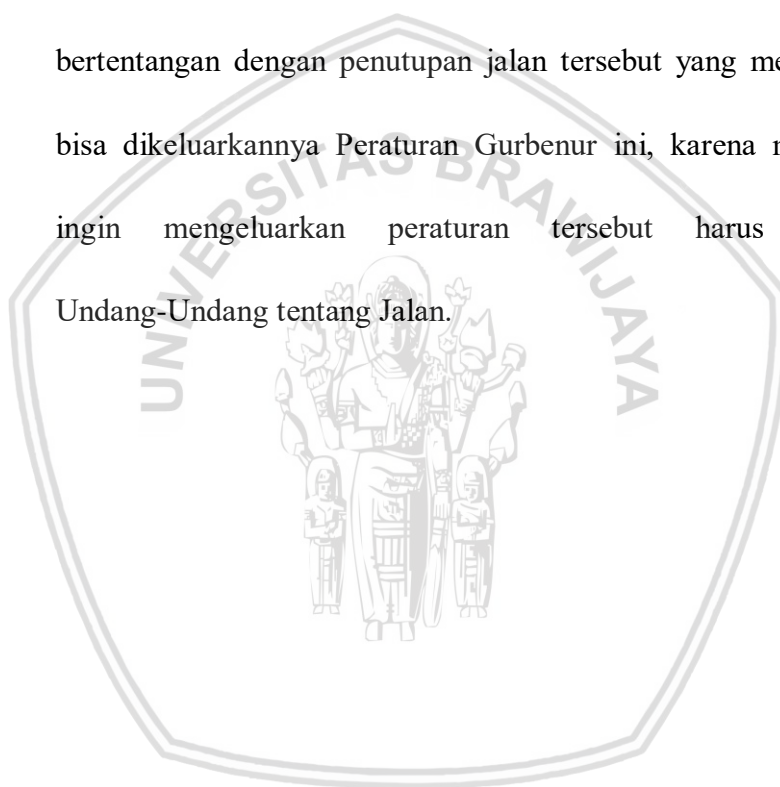
Dari pengamatan yang dilakukan di tanah abang oleh peneliti dan khususnya pada Blok G Tanah abang bahwa semua pedagang kaki lima Jalan Jatibaru bisa dipindahkan semua pada Blok G Tanah Abang. Walaupun memang Blok G tanah abang tidak seramai dengan blok lainnya tetapi lebih baik berdagang di ruko yang sudah mempunyai kepastian hukumnya dari pada harus berjualan di jalan ataupun trotoar, ini pun diamini oleh salah satu sumber yang berjualan atau menjadi pedagang kaki lima Jatibaru<sup>61</sup>. Keadaan Blok G pun semakin memperhatikan karena banyaknya kios yang sudah tutup dan tidak buka ataupun ada juga kios yang ditutup karena tidak bisa menyelesaikan masalah administrasi. Keadaan ini pun sangat disesali pihak yang sudah berjualan di Blok G dimana diatas sudah saya jabarkan, mereka berharap bahwa ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai hal ini karena dagangan mereka yang tak kunjung laku.

### 4. Adanya Payung Hukum yang jelas

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan narasumber Ibu Amira, 41 tahun, pedagang kaki lima Jalan jatibaru, tanggal 26 Juli 2018 pukul 12.50 WIB

Instruksi Gubernur nomor 17 Tahun 2018 tentang Penataan Kawasan Tanah Abang dianggap kurang kuat untuk menjadi payung hukum untuk kebijakan ini, hal ini pun dibenarkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bahwa memang dalam memutuskan kebijakan tersebut harusnya dikeluarkan Peraturan Gubernur, tapi karena banyaknya masalah atau pun Undang-Undang yang bisa bertentangan dengan penutupan jalan tersebut yang membuat tidak bisa dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini, karena memang jika ingin mengeluarkan peraturan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang tentang Jalan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian ini tentang Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa dari penelitian di lapangan yang dilakukan di lapangan bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Terkait Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang belum berjalan efektif, karena terbukti dari akibat yang ditimbulkan, mulai dari keluhan pejalan kaki di daerah Jatibaru khususnya yang turun dari stasiun tanah abang, keluhan dari supir-supir transportasi umum seperti wawancara yang saya lakukan dengan supir mikrolet jurusan Tanah Abang karena berkurangnya penghasilan, keluhan dari para pedagang dari Blok G Tanah Abang yang omsetnya menurun drastis. Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang dinilai banyak melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan seperti pada pasal 131 ayat (1) bahwa ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 28 ayat (2) dalam Undang-Undang yang sama bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Berdasarkan pasal 34 ayat (4) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang dimana dikatakan bahwa trotoar itu sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Hal ini menjelaskan bahwa fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Serta belum mempunyai payung hukum yang jelas, Instruksi Gubernur nomor 17 Tahun 2018 tentang penataan kawasan Tanah Abang dianggap kurang kuat untuk menjadi payung hukum untuk kebijakan ini, hal ini pun dibenarkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bahwa memang dalam memutuskan kebijakan tersebut harusnya dikeluarkan Peraturan Gubernur, tapi karena banyaknya masalah atau pun Undang-Undang yang bisa bertentangan dengan penutupan jalan tersebut yang membuat tidak bisa dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini, karena memang jika ingin mengeluarkan peraturan tersebut harus ada kajian dan berdasarkan Undang-Undang tentang Jalan. Bisa

dilakukan kalau ada limitasi waktu seperti misal Car Free day, dan dilakukan dengan pihak-pihak terkait.

2. Dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi pada jalan Jatibaru Tanah Abang di Jakarta maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah dan akan melaksanakan:

- a. Segera membangun *Skybridge*
- b. Memindahkan para pedagang kaki lima Jatibaru
- c. Membangun kembali Blok G Tanah Abang

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Terkait Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Banyaknya masalah yang timbul akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai penutupan Jalan Jatibaru untuk digunakan pedagang kaki lima berjualan, membuat pemerintah harus menemukan solusi yang tepat bagi para pedagang kaki lima tersebut, salah satunya mungkin memindahkan mereka ke kios Blok G Tanah Abang, karena keadaan Blok G kini memperhatikan sekali banyak kios yang kosong sudah ditinggal oleh para pedagang.

2. Dibangunnya kembali Blok G Tanah Abang, menjadi lanjutan pembahasan diatas bahwa pemerintah maupun PD. Pasar Jaya haruslah menghidupkan atau setidaknya merenovasi kembali Blok G yang sudah sangat sepi ini agar kembali ramai pengunjung dan bisa menampung para pedagang kaki lima.
3. Bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus sesegara mebangun Skybridge yang rencananya akan digunakan salah sataunya untuk merelokasi para pedagang kaki lima Jatibaru. Tidak boleh ada penundaan bagi pembangunan Skybridge ini agar para pedagang kaki lima tidak lagi menggunakan trotoarmaupun jalan Jatibaru sebagai lahan jualan mereka.
4. Bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mencabut pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dimana dalam pasal ini diperbolehkannya PKL untuk berjalan di bagian jalan atau trotoar, harus ada penempatan bagi para PKL selain berjalan di bagian jalan atau trotoar.
5. Harus adanya payung hukum yang jelas bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan, bahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mungkin harus segera mencabut peraturan yang dimana mengharuskan mereka menutup Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Achmad Ali. **Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)**. Jakarta. Penerbit Kencana, 2009.
- Agustinawati, **Apa dan Mengapa Pedagang Kaki Lima**. Pustaka Setia. Semarang. 2000
- Aris Ananta, **Mengurai Akar Masalah Pedagang Kaki Lima**. Yayasan Obor. Jakarta. 2002
- Atmosoeprapto, **Menuju SDM Berdaya**, Jakarta:PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO, 2002
- Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Dellyana, Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty: Yogyakarta, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Dody Setiawan, **Pengantar Kebijakan Publik**, Intelegensia Media, Malang, 2017.
- Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010.
- Karafir Pieter Yan, **Pemupukan Modal Pedagang Kakilima: Penelitian Studi Kasus di Daerah Tanah Abang Pasar Jakarta**, Jakarta: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial, 1977.
- Muasaroh, **Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelsksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP**, Universitas Brawijaya Malang, 2010.
- Roni Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.
- Satjipto Rahardjo, **Masalah Penegkan Hukum**. Sinar Baru: Bandung, 1983
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI – Press, Jakarta, 2007.

Sondang Siagian, **Pengertian Tentang Efektifitas**, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

W. Friedmann, **Teori-teori Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum** (Susunan I), penerjemah Muhammad Arifin, Cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1990.

#### **Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Instruksi Gubernur nomor 17 Tahun 2018 tentang penataan kawasan Tanah Abang

#### **Internet :**

Angggita Muslimah, Sejarah Tanah abang,  
<https://travel.kompas.com/read/2017/11/09/182000327/sejarah-tanah-abang-dari-kebun-palem-hingga-pusat-grosir>, diakses 11 September 2017

David Oliver Purba, Kondisi Tanah Abang kian semerawut karena PKL, <https://megapolitan.kompas.com>, diakses pada tanggal 06 Juni 2018

Hari Ariyanti,  
<https://www.merdeka.com/jakarta/tak-ada-aturan-soal-jl-jatibaru-tak-bole-h-untuk-motor-sandi-bilang-tanya-dishub.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2018

Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>.

Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2015.

Jessi Carina, Unjuk Rasa Supir Angkot dan Dugaan ada Unsur Politis, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/31/09203911/unjuk-rasa-sopir-angkot-tanah-abang-dan-dugaan-ada-unsur-politis>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018

Muliadi Nur, Tipologi Penelitian Hukum, [www.pojokhukum.com](http://www.pojokhukum.com), diakses pada 17 Desember 2017 pukul 12.44 WIB.

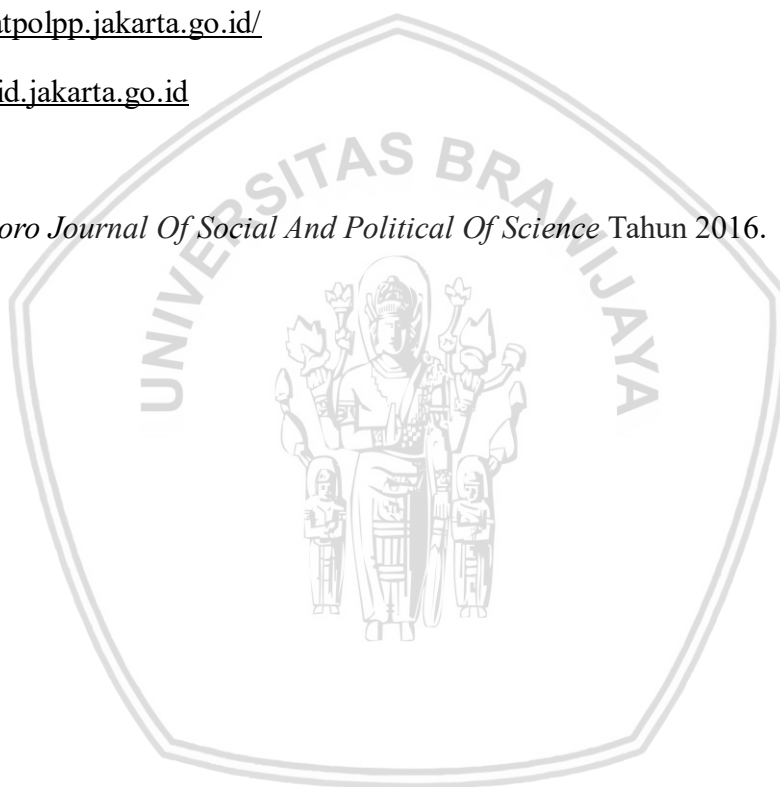
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia>, diakses pada 12 Januari 2018

<https://satpolpp.jakarta.go.id/>

<http://ppid.jakarta.go.id>

**Jurnal:**

*Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science* Tahun 2016.





## LAMPIRAN



Foto bersama narasumber PKL Jatibaru



Foto bersama narasumber Satpol PP DKI Jakarta



Foto ketika melakukan wawancara di Dinas Perhubungan Jakarta

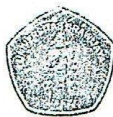


Foto bersama narasumber pedagang Blok G Tanah Abang



Foto bersama narasumber supir mikrolet 06 jurusan Tanah Abang





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 39 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

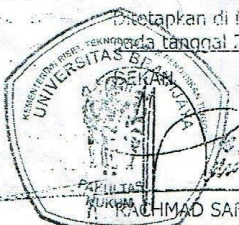
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- KESATU : Dr. Shinta Hadyantina, SH, M.Pd, Priat Zainudin, SH, M.Hum., masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Yulki Riananda NIM 141010101111082

- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 22 Maret 2018



NIP. 196208051988021001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizki Resnandar  
No. Induk : 24500611108  
Judul Skripsi : Efektivitas p 2017  
Pilih Revisi/2017 tahun  
Pantau JI Tanah Abang  
Bimbingan mulai :  
Bimbingan selesai :

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Siti Nur Hafidhah  
Nama Dosen Pendamping : Anif Zamudin, SH., M.Hum  
SK. Dekan : No.  
Tgl :

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
25/03/2018	Latihan beladhy + Bab 3	Pactmate	
24/04/2018	daftar isi opsional	tanpa m-referensi	
18/05/2018	daftar pustaka + footnote	Perbaiki penulisan	
20/08/2018	tanah data Bab 4	banah latar beladhy	
24/08/2018	Perbaiki kesimpulan	tanah bab 2	
08/09/2018	tanah data + tabel	daftar pustaka + kesimpulan	

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Hukum

Dosen Pembimbing Pendamping

Malang, 18 September 2018  
Dosen Pembimbing Utama

Luthi Affendi SH M.Hum

Anif Zamudin, SH., M.Hum

SHINTA H.

